

## BAB VI

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



Visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dapat tercapai dengan efektif tepat guna dan efisien selama lima tahun ke depan apabila strategi dan arah kebijakan terumuskan secara komprehensif. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan dengan serangkaian arah kebijakan.

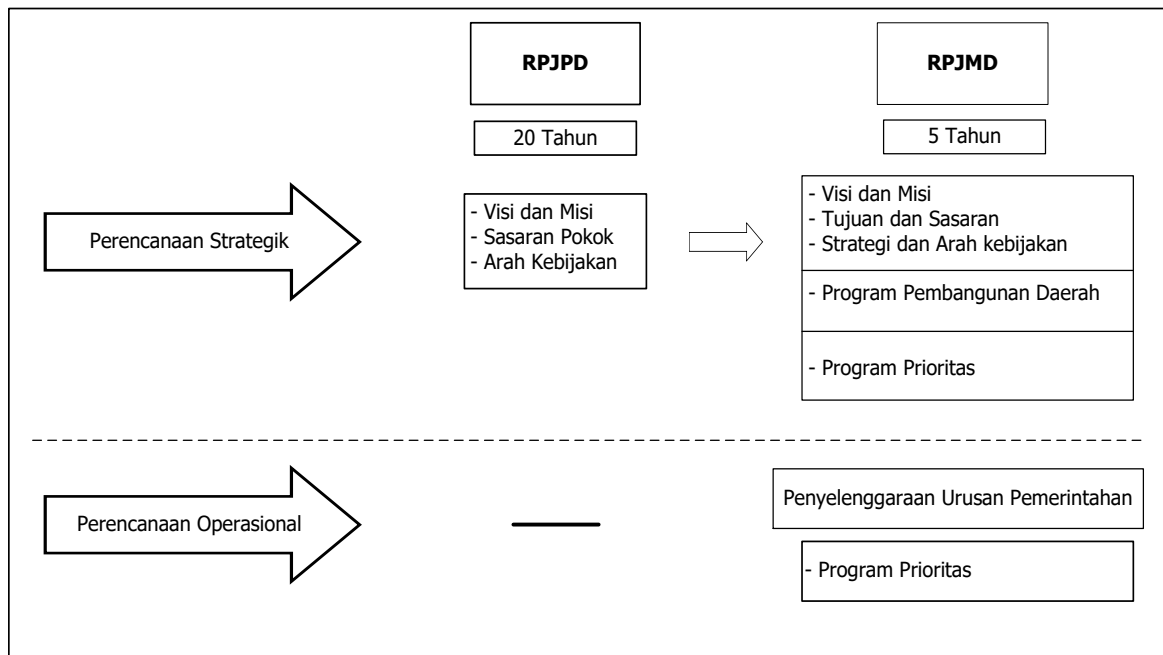
Strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan tersebut nantinya menjadikan pilihan strategi menjadi rasional dan konkret sehingga pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Pada dasarnya, semua program merupakan program-program RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Jilid I (pertama), meskipun pada RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025 berada pada pembangunan jangka menengah ketiga. Hal ini terjadi karena Provinsi Kalimantan Utara mulai terbentuk pada tahun 2013 dan memiliki gubernur dan wakil gubernur secara definitif pada tahun 2016.

Komposisi perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang siap aksi mampu diimplementasikan dan diwujudkan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka yang dijelaskan dalam bagan berikut ini:



**Gambar 6.1.**  
**Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional**  
*Sumber: Lampiran III Permendagri No. 54 Tahun 2010*

Agar strategi yang telah disepakati dapat berjalan, maka dibutuhkan komitmen. Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah adalah:

1. Menerjemahkan strategi ke dalam bentuk yang operasional;
2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;
3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;
4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan
5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik.

Secara garis besar, Perencanaan Strategik RPJMD Provinsi Kalimantan Utara pada bagian ini dituangkan pada tabel strategi dan arah kebijakan berikut ini,

**Tabel 6.1.**  
**Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 1 “Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri”**

| No   | Sasaran  | Strategi                            | Arah kebijakan  |
|--|--|-------------------------------------|---|
| <b>Tujuan 1: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat</b> |  |                                     |   |
| 1.   | Berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah | Peningkatan pemberdayaan masyarakat | Menciptakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin<br>Mengembangkan usaha pertanian masyarakat miskin<br>Mewujudkan koperasi yang berkualitas<br>Mengembangkan wilayah transmigrasi yang produktif<br>Menciptakan industri kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal |

| No   | Sasaran  | Strategi  | Arah kebijakan   |
|--|--|---|--|
|  |  |   | Mengembangkan hutan kemasyarakatan berbasis hasil hutan non kayu   |
|  |  |   | Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari  |
|  |  |   | Mengembangkan manajemen usaha bagi perempuan   |
|  |  | Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin   | Meningkatkan kualitas dan pemerataan jumlah sarana sosial  |
|  |  |   | Meningkatkan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial  |
|  |  |   | Meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial   |
|  |  |   | Meningkatkan pemberdayaan sosial dan kapasitas hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial  |
|  |  |   | Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan para penyandang cacat dan trauma   |
|  |  |   | Meningkatkan kualitas penanganan dan pembinaan anak terlantar  |
|  |  |   | Meningkatkan kualitas penanganan dan pembinaan eks. penyandang penyakit sosial   |
|  |  | Peningkatan perluasan lapangan kerja  | Memperluas penyebaran informasi lapangan kerja   |
|  |  |   | Memfasilitasi pencari kerja dan penyedia kerja dengan penekanan pada penduduk lokal  |
|  |  | Peningkatan investasi dan teknologi   | Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menerapkan teknologi pengembangan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja |
|  |  | Peningkatan kualitas ketrampilan masyarakat   | Meningkatkan sistem peningkatan ketrampilan dan sarana pelatihan ketenagakerjaan   |
|  |  |   | Mengembangkan jiwa kewirausahaan generasi muda melalui pelatihan kewirausahaan dan industri  |
| <b>Tujuan 2: Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan</b> |  |   |  |
| 2.   | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau ( <i>green economy</i> ) | Peningkatan infrastruktur fisik pertanian   | Meningkatkan jaringan irigasi  |
|  |  | Peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian                                    | Meningkatkan ketersediaan sarana produksi pertanian  |
|  |  |   | Mengembangkan teknologi pertanian  |
|  |  |   | Mengembangkan pola integrated farming  |
|  |  | Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pertanian                                      | Meningkatkan kuantitas aparatur sipil negara di bidang pertanian   |
|  |  | Peningkatan pengelolaan dan kelembagaan perekonomian rakyat                           | Mengembangkan kelembagaan desa dan pertanian   |
|  |  |   | Mengembangkan pemasaran produk pertanian   |
|  |  | Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap                      | Meningkatkan kualitas pelaku usaha perikanan pasca panen ( <i>off-farm</i> )   |
|  |  |   | Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya  |
|  |  |   | Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap   |
|  |  | Peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan | Meningkatkan potensi dan budaya masyarakat pesisir   |
|  |  |   | Meningkatkan pembinaan dan fasilitas   |

| No  | Sasaran  | Strategi  | Arah kebijakan   |
|---|--|---|--|
|   |  | dan perikanan   | untuk pengawasan pesisir   |
|   |  | Peningkatan daya tarik pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan              | Meningkatkan kualitas ODTW   |
|   |  | Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan kepariwisataan                         | Meningkatkan fungsi dan peran SDM dan kelembagaan kepariwisataan   |
|   |  | Pengembangan sistem informasi manajemen dan pemasaran pariwisata                | Mengembangkan sistem informasi, pasar dan pariwisata yang terpadu  |
|   |  | Peningkatan produksi pertambangan   | Meningkatnya informasi dan produksi pertambangan (batu bara dan sumber daya mineral)   |
|   |  | Peningkatan kualitas hasil pertambangan   | Meningkatkan sarana dan teknologi kualitas hasil produksi pertambangan   |
|   |  | Peningkatkan SDM pertambangan   | Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pertambangan   |
|   |  | Peningkatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan                             | Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan reklamasi pertambangan   |
|   |  | Peningkatan teknologi pengembangan ekonomi yang berdaya saing                   | Menerapkan teknologi pengembangan ekonomi yang berdaya saing   |
|   |  |   | Mewujudkan perdagangan lokal yang optimal  |
|   |  |   | Menciptakan produk layak jual dan memenuhi standar   |
| 3.  | Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi utama wilayah           | Pengendalian sistem penataan ruang wilayah yang terintegrasi                    | Mewujudkan perencanaan tata ruang  |
|   |  |   | Mewujudkan pemanfaatan ruang   |
|   |  |   | Mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang  |
|   |  |   | Mewujudkan penyelenggaraan, pemanfaatan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau   |
|   |  | Pengembangan sarana prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara    | Membangun sarana prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara  |
|   |  |   | Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pada wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam rangka percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor dan Kawasan Industri Tanah Kuning (KIPI) |
|   |  | Pembangunan infrastruktur dasar wilayah   | Meningkatkan pengelolaan air bersih dan air baku   |
|   |  |   | Menyediakan sistem pengelolaan air minum dan air limbah  |
|   |  |   | Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana sarana dasar permukiman  |
|   |  |   | Meningkatkan sarana prasana dasar pendukung permukiman   |
| Mewujudkan pengelolaan sampah yang baik dan sehat |  |   |  |
| Menyediakan areal pemakaman                       |  |   |  |
| Penyediaan sarana prasarana fisik energi          | Mewujudkan kawasan bebas banjir dan prasarana pengaman abrasi pantai |   |  |
|   | Meningkatkan kemampuan sumber daya energi                            |   |  |
| 4.  | Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga            | Peningkatan prasarana jalan dan transportasi internal provinsi dan antar negara | Meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan internal provinsi  |
|   |  |   | Meningkatkan pemasangan fasilitas dan rambu-rambu jalan  |
|   |  |   | Meningkatkan sarana penunjang  |

| No   | Sasaran  | Strategi   | Arah kebijakan   |
|--|--|--|--|
|  |  |  | keamanan dan keselamatan pengguna jalan  |
|  |  |  | Meningkatkan kemudahan aksesibilitas bagi pengguna transportasi massal   |
|  |  | Peningkatan kualitas penyelenggaraan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa komunikasi dan informatika               | Meningkatkan pelayanan jasa dan jaringan komunikasi dan informatika  |
| 5.   | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup   | Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup  | Meningkatkan peran serta SDM, kelembagaan, dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup   |
|  |  |  | Meningkatkan efektivitas upaya pemanfaatan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan hidup   |
|  |  |  | Mengembangkan mekanisme mitigasi perubahan iklim   |
|  |  |  | Mengendalikan pencemaran air, udara, tanah dan limbah tambang dengan meningkatkan ketaatan perusahaan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan |
|  |  | Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan  | Meningkatkan industri pengolahan hasil hutan kayu/non kayu skala kecil dan besar   |
|  |  |  | Meningkatkan tata kelola pengelola sumber daya kehutanan   |
| <b>Tujuan 3: Meningkatkan daya saing sumber daya manusia</b>   |  |  |  |
| 6.   | Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat  | Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan menengah yang berkualitas                                    | Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan menengah umum dan kejuruan  |
|  |  | Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan  | Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan  |
|  |  | Peningkatan proses pendidikan yang berkualitas dan bebas gratifikasi   | Memperkuat pelaksanaan kurikulum, penerapan SPM dan mengembangkan manajemen pendidikan yang bebas gratifikasi                                      |
|  |  | Peningkatan mutu pendidikan luar biasa di seluruh wilayah perkotaan, pedalaman, pesisir dan perbatasan                             | Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan luar biasa   |
|  |  | Peningkatan minat baca di seluruh wilayah perkotaan, pedalaman, pesisir dan perbatasan   | Meningkatkan mutu perpustakaan daerah  |
|  |  | Peningkatan pelestarian dan pemahaman serta apresiasi sejarah, seni dan budaya daerah dalam memperkuat tradisi ketahanan keragaman | Meningkatkan pelestarian dan pemahaman nilai budaya  |
|  |  |  | Meningkatkan apresiasi terhadap seni sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa   |
|  |  | Peningkatan aktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan   | Mengembangkan potensi pemuda pelopor pembangunan   |
|  |  |  | Meningkatkan mutu organisasi kepemudaan dan olahraga   |
| Pengembangan potensi dan minat olahraga pelajar dan masyarakat | Meningkatkan kemitraan dan peran serta masyarakat, pemerintah dan swasta dalam memajukan bidang olahraga |  |  |

| No | Sasaran                                    | Strategi  | Arah kebijakan   |
|----|--|---|--|
|    |  | Peningkatan mutu kebijakan dan manajemen olahraga   | Meningkatkan mutu organisasi olahraga  |
|    |  | Peningkatan mutu fasilitas penunjang kebutuhan kegiatan pemuda dan olahraga di seluruh wilayah perkotaan, pedalaman, pesisir dan perbatasan | Meningkatkan mutu fasilitas penunjang kebutuhan kegiatan pemuda dan olahraga                                   |
| 7. | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat  | Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mencegah dan mengatasi masalah kesehatan               |
|    |  | Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan   | Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan   |
|    |  | Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana kesehatan   | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan   |
|    |  | Peningkatan kualitas dan kuantitas proses pelayanan kesehatan   | Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan   |
|    |  |   | Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit  |
|    |  | Peningkatan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan   | Meningkatkan inovasi program pelayanan kesehatan di seluruh daerah terutama di daerah perbatasan dan terpencil |
|    |  | Peningkatan pelayanan keluarga berencana  | Meningkatkan jumlah dan kualitas keluarga ber-KB   |
|    |  | Pembangunan keluarga melalui ketahanan keluarga   | Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga             |
|    |  |   | Meningkatkan ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga  |

**Tabel 6.2.**  
**Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 2 “Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai”**

| No   | Sasaran  | Strategi   | Arah kebijakan  |
|--|--|--|---|
| <b>Tujuan 1: Menjaga kedaulatan negara</b>             |  |  |   |
| 1.   | Terjaganya keutuhan NKRI                               | Peningkatan sistem penjagaan kedaulatan negara   | Meningkatkan cakupan PLB di perbatasan negara<br>Membentuk desa sadar kedaulatan NKRI<br>Meningkatkan kewaspadaan pelanggaran batas wilayah perbatasan dengan negara lain                         |
|  |  | Penguatan implementasi kerjasama antar negara  | Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam forum kerjasama regional antar negara  |
|  |  | Peningkatan peran desa perbatasan dalam menjaga keutuhan NKRI                            | Memperkuat jiwa dan semangat keutuhan NKRI<br>Membangun sistem fasilitasi pendukung keutuhan wilayah NKRI   |
| 2.   | Terjaganya keamanan                                    | Peningkatan upaya pencegahan, penanganan, dan pembinaan pasca gangguan keamanan          | Meningkatkan pencegahan, pengamanan dan penanganan pasca gangguan keamanan wilayah  |
| <b>Tujuan 2: Membangun daerah perbatasan yang aman</b> |  |  |   |
| 3.   | Terwujudnya daerah perbatasan yang tertib dan tenteram | Fasilitasi perwujudan wilayah perbatasan yang mendukung wilayah yang tertib dan tenteram | Meningkatkan kondisi tertib dan aman di wilayah perbatasan<br>Meningkatkan koordinasi antar lembaga yang mendukung wilayah perbatasan yang tertib dan aman<br>Meningkatkan peran serta masyarakat |

| No  | Sasaran                     | Strategi  | Arah kebijakan   |
|---|-----------------------------|---|--|
|   |                             |   | dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang tertib dan aman   |
| <b>Tujuan 3: Mewujudkan penegakan hukum</b> |                             |   |  |
| 4.  | Terwujudnya penegakan hukum | Peningkatan sumberdaya dan sarana penegakan hukum | Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum yang berintegritas moral dan memiliki profesionalisme yang lebih baik |
|   |                             |   | Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku tertib terhadap hukum dan regulasi                           |
|   |                             |   | Membangun sistem dan aturan penegakan hukum yang memadai untuk memberantas bisnis dan transaksi ilegal           |

**Tabel 6.3.**  
**Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 3 “Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa”**

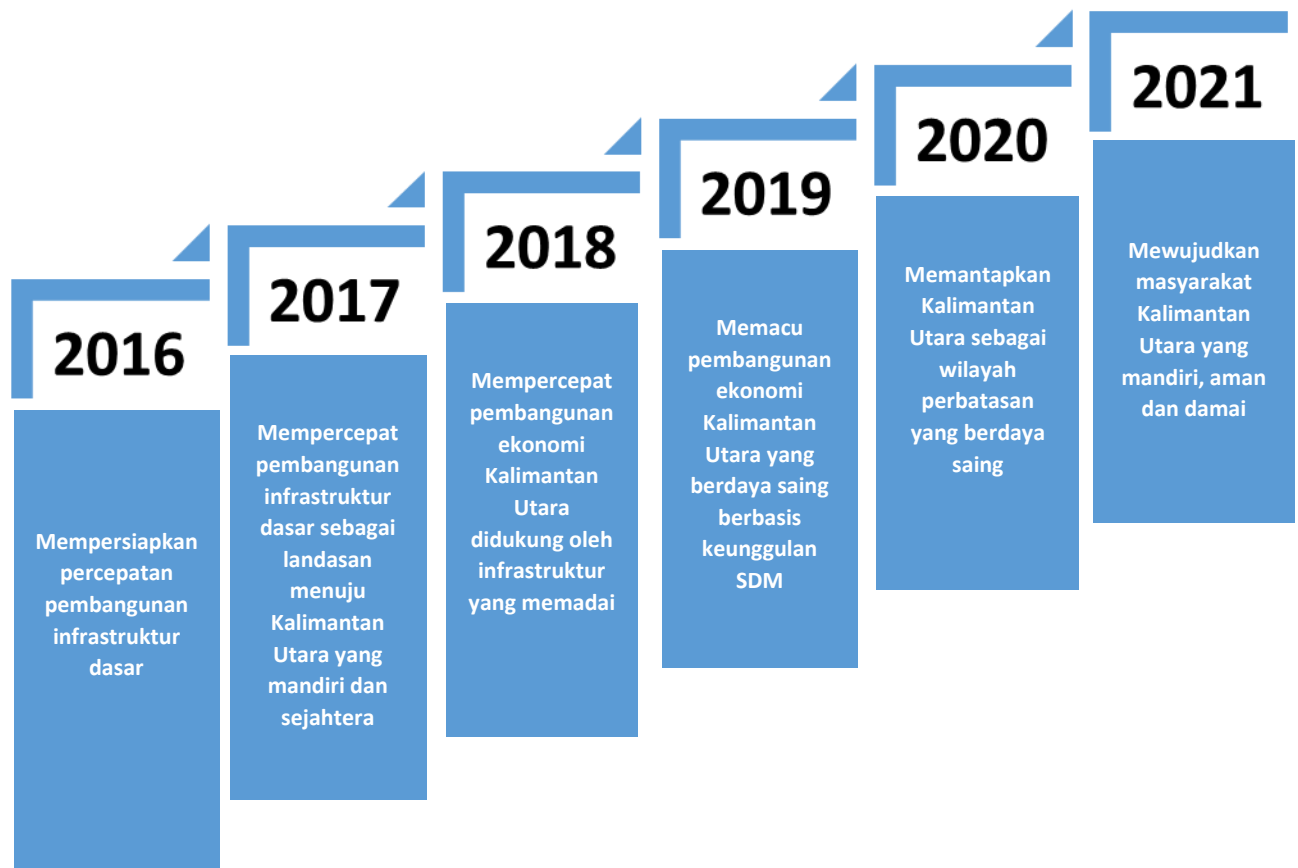
| No  | Sasaran  | Strategi   | Arah kebijakan  |
|---|--|--|---|
| <b>Tujuan 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel</b> |  |  |   |
| 1.  | Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas | Peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi pemerintah           | Mengoptimalkan komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan dalam upaya menjadi <i>pilot project</i> penataan birokrasi yang terintegritas |
|   |  | Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah                  | Mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan   |
|   |  |  | Memperkuat pelaksanaan tata pemerintahan dan pelayanan berbasis kewilayahan   |
|   |  | Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur       | Meningkatkan kualitas SDM aparatur  |
|   |  |  | Meningkatkan pembinaan sumberdaya aparatur  |
|   |  |  | Meningkatkan pengawasan sumberdaya aparatur   |
|   |  | Peningkatan kapasitas lembaga desa dan aparatur pemerintahan desa    | Menjaga konsistensi regulasi dan implementasi   |
|   |  |  | Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan  |
|   |  |  | Mengembangkan penerapan sistem informasi desa   |
|   |  | Pengembangan kebijakan pembangunan yang berkeadilan                  | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa  |
| Meningkatkan penganggaran berbasis pembangunan yang berkeadilan                 |  |  |   |
| 2.  | Terwujudnya pemerintahan akuntabel   | Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif | Membangun jejaring kelembagaan perlindungan perempuan dan anak tingkat daerah   |
|   |  |  | Meningkatkan pembinaan dalam rangka pengendalian pembangunan  |
|   |  |  | Mengembangkan Sistem Pengendalian internal pemerintah SPIP di seluruh SKPD  |
|   |  |  | Menyiapkan wilayah potensial untuk menjadi daerah otonom baru   |
|   |  |  | Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan yang partisipatif  |
|   |  | Peningkatan kualitas manajemen pembangunan                           | Menguatkan jejaring penelitian dan pengembangan pembangunan   |
|   |  |  | Mengembangkan data dan statistik pembangunan  |
|   |  |  | Mengefektikan pengendalian dan  |

| No  | Sasaran  | Strategi  | Arah kebijakan  |
|---|--|---|---|
|   |  |   | evaluasi pembangunan<br>Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah yang dapat dijadikan bahan Informasi dan dapat dipertanggung jawabkan<br>Meningkatkan kualitas penatausahaan barang milik daerah  |
|   |  | Peningkatan pelayanan umum, komunikasi, dan informasi   | Mengembangkan teknologi informasi dan aplikasi telematika dalam rangka e-government<br>Meningkatkan pelayanan administrasi, umum, kerumahtanggaan dan keprotokolan pemerintah daerah<br>Mengoptimalkan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah<br>Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerjasama antar daerah dan antar negara (Sosial Ekonomi Malindo dan BIMP-EAGA)<br>Mengoptimalkan fungsi kesekretariatan DPRD<br>Membina dan melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan pertanahan |
| <b>Tujuan 2: Mewujudkan pelayanan publik yang prima</b> |  |   |   |
| 3.  | Menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik | Peningkatan sistem pelayanan yang prima<br>Pembentukan jiwa KORSA yang bersifat abdi masyarakat | Mengimplementasikan pedoman/SOP pelayanan publik yang prima<br>Mengembangkan integritas, persatuan, patriotisme, kebanggaan, semangat dan daya juang, serta atribut sebagai abdi masyarakat   |
| 4.  | Meningkatnya pelayanan perizinan               | Pengembangan regulasi dan kualitas pelayanan perizinan  | Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perizinan   |
| 5.  | Meningkatnya pelayanan kependudukan            | Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kependudukan                                       | Mengembangkan sistem data kependudukan dan meningkatkan kemampuan SDM dalam pemanfaatan IT  |

Penyelesaian isu-isu strategis dituangkan dalam sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Tahapan arah kebijakan untuk mencapai sasaran disusun berdasarkan prioritas yang dianalisis secara temporal. Sasaran yang menjadi prioritas untuk dicapai mulai tahun pertama pelaksanaan RPJMD berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar sebagai landasan menuju Kalimantan Utara yang mandiri dan sejahtera. Tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat mencapai percepatan pembangunan ekonomi yang telah didukung oleh infrastruktur yang memadai. Tahap selanjutnya dalam implementasi arah kebijakan adalah memacu pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis keunggulan sumber daya manusia, hal ini dapat dilakukan jika percepatan pembangunan ekonomi telah tercapai. Tahun keempat pelaksanaan RPJMD diharapkan telah dapat mencapai pemantapan Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan yang berdaya saing. Pada tahun akhir implementasi RPJMD, diharapkan Provinsi Kalimantan Utara yang mandiri, aman dan damai dapat terwujud seutuhnya. Perwujudan visi, misi dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun



2016-2021 secara kronologis dideskripsikan melalui tahapan arah kebijakan Kalimantan Utara sebagai berikut.



**Gambar 6.2.**  
Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021  
*Sumber: Hasil Analisis*